

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 56 TAHUN 2022 DI SEKOLAH DASAR NEGERI TANAH KALIKEDINDING II / 252 KOTA SURABAYA

Pungki Purnamasari Nugraheni¹⁾, Spto Pramono²⁾

¹⁾²⁾Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Dr. Soetomo Surabaya

Email: Pungkipurnamasarinugraheni@gmail.com

ABSTRAK

Bantuan sosial adalah salah satu langkah penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial di suatu negara. Pada umumnya, bantuan sosial disalurkan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan rendah dan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, diterbitkan Peraturan Walikota yang mengatur tentang pendataan masyarakat penerima manfaat agar bantuan sosial dapat tersalurkan dengan baik khususnya pada bantuan untuk kegiatan pendidikan di Sekolah Dasar, sesuai dengan analisis model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh George Edward III. Dalam teori George Edward III disebutkan bahwa ada empat aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan penelitian wawancara guna memperoleh data primer mengenai implementasi kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2022 di Sekolah Dasar Negeri Tanah Kalikedinding II/ 252 Kota Surabaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program MBR di SDN Tanah Kalikedinding II/ 252 sudah dapat dikatakan masih kurang pada aspek komunikasi/ sosialisasi. Informasi yang disosialisasikan dari sekolah kepada siswa dan orang tua siswa masih belum jelas sehingga menimbulkan kebingungan serta iri antar walimurid karena ada yang selayaknya dapat tetapi faktanya tidak dapat bantuan, itu muaranya pada pendataan awal oleh RT dan kelurahan, ada unsur kekeluargaan untuk pendataan awal program, Akan tetapi, seluruh sumber daya juga sudah terpenuhi dan disposisi pelaksana dalam implementasi program MBR juga cukup baik, hal ini dibuktikan dengan kinerja yang efektif sehingga dapat memberikan pelayanan kepada siswa. Selain itu adanya juknis pelaksanaan dan pembagian tugas antarinstansi serta kerjasama yang baik dari organisasi pelaksana program juga menambah keberhasilan pelaksanaan program Masyarakat Berpenghasilan rendah.

Kata Kunci : Implementasi, Model George Edward III dan Masyarakat Berpenghasilan rendah

ABSTRACT

Social Assistance is an important step in the development of social welfare in a country. In general, social assistance is distributed to people who have low incomes and experience difficulties in meeting their basic needs. Therefore, a mayoral regulation was issued which regulates data collection on beneficiary communities so that social assistance can be properly distributed, especially assistance for educational activities in elementary schools, in accordance with the analysis of the policy implementation approach model formulated by George Edward III. In George Edward III's theory, it is stated that there are four aspects that influence the success of policy implementation, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure.

The method used in this study is a qualitative descriptive method, where the main instrument in the research is the researcher himself. The data sources used are primary data sources and secondary data related to the empirical situation and condition of policy implementation. In this study, the authors also used interview research to obtain primary data regarding the implementation of the Surabaya mayoral regulation policy number 56 of 2022 at Tanah Kalikedinding II / 252 public elementary school, Surabaya city.

The results of the study show that the implementation of the MBR program at SDN Tanah Kalikedinding II/252 can be said to be lacking in the communication/socialization aspect. Information disseminated from

schools to students and parents of students is still unclear, causing confusion and jealousy among parents because there are those who should receive assistance but in fact do not receive assistance. However, all resources have also been fulfilled and the disposition of the executors in implementing the MBR program is also quite good, this is evidenced by their effective performance so that they can provide services to students. In addition, the existence of technical guidelines for implementing and dividing tasks between agencies and good cooperation from program implementing organizations also adds to the success of implementing the Low-Income Community program.

Keywords: Implementation, George Edward III Model and Low Income Communities

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan Peraturan Walikota Surabaya Surabaya No. 56 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah memiliki beberapa kendala. Sebenarnya pelaksanaan Perwali tersebut sudah cukup baik apabila dikaitkan dengan hasil yang tercapai. Namun, ada sedikit kesalahpahaman masyarakat tentang implementasi Perwali Surabaya Nomor 56 Tahun 2022. Masih ada warga mampu yang ingin mendaftar MBR. Seharusnya dari pihak RT/ RW lebih jelas dalam memberikan informasi. Namun semua itu akan diputuskan oleh Dinas Sosial.

Komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial dinilai kurang informatif, sebab para ASN pada Dinas Sosial menggunakan bahasa baku dalam penyampaian informasi. Pada pelaksanaan kebijakan bantuan ini tidak bisa mengusulkan ke Dinas Sosial siapa saja yang dapat bantuan, tetapi hanya terima jadi saja, sedangkan penerimaan dan pendataan oleh RT dan RW, sedangkan pihak sekolah hanya pelaksanaan sudah jalan kebijakan, seharusnya jika bantuan diperuntukkan kepada anak sekolah seharusnya Dinas Sosial meminta data agar tepat sasaran siapa saja yang berhak dapat, karena sekolah lebih memahami urusan kondisi murid, maka ditemukan implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2022 pelaksanaan tidak tepat sasaran, ada yang tidak dapat bantuan tetapi faktanya yang bersangkutan mampu, ada yang mampu secara finansial tetapi nyatanya dapat bantuan, maka pengimplementasian kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2022 menggunakan pertimbangan dan masukan oleh sekolah agar tepat sasaran dalam implementasinya.

Dari analisis permasalahan diatas masih banyak ditemukan pada implementasi program tidak tepat sasaran dalam bantuan sekolah yang

diberikan langsung kepada masyarakat penerima digunakan untuk bantuan keperluan sekolah.

B. LANDASAN TEORITIS

Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Permatasari 2022, dengan Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019, Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah, *Public Sphere Review Journal of Public Administration*, Hangtuh Surabaya, Vol. 1 No. 1 March (2022) Page: 21-26, berfokus kepada Dinas Sosial selektif dalam mengkategorikan seseorang ke dalam kategori MBR, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deksriptif. Teori yang digunakan yaitu implementasi kebijakan menurut George Edward III, terdiri dari faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi, hasil penelitiannya, implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 pada tata cara pengumpulan dan pengolahan data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah cukup optimal, namun masih perlu perbaikan. Terdapat faktor pendukung diantaranya: faktor komunikasi yaitu transmisi dan konsistensi sudah efektif, faktor sumber daya yaitu terdapat fasilitas, informasi dan kewenangan yang sudah efektif; faktor disposisi yaitu pengangkatan birokrasi sudah terlaksana dengan baik; dan faktor struktur birokrasi yaitu SOP dan fragmentasi juga sudah efektif.

Studi implementasi dalam perspektif ini misalnya yang dilakukan oleh Edward III (1980) yang mengidentifikasi adanya 4 (empat) faktor determinan utama yang akan mempengaruhi proses dan hasil implementasi kebijakan yaitu: (i) komunikasi (*communication*); (ii) struktur birokrasi (*bureaucratic structure*); (iii) sumberdaya (*resources*); dan (iv) disposisi (*disposition*) (Edward III, 1980:). Interaksi antarkeempat faktor determinan implementasi ini.

Dari keterangan tersebut di atas, dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Variabel komunikasi yaitu proses informasi mengenai kebijaksanaan dari pelaksanaan tingkat atas kepada aparat pelaksana di tingkat di bawahnya;
- b. Variabel struktur birokrasi mencakup bagaimana struktur pemerintah, bagian tugas yang ada dan koordinasi yang dilakukan;
- c. Variabel sumber-sumber yaitu manusia, informasi dan sarana prasarana yang tersedia dalam pelaksanaan kebijakan;
- d. Variabel kecenderungan-kecenderungan atau dapat dikatakan sikap atau disposisi aparat pelaksana

C. METODE

Pertimbangan lain dalam penelitian yang bersifat kualitatif adalah bahwa dampak kebijakan tidak hanya mengungkapkan peristiwa riil yang bisa dikuantitatifkan, tetapi lebih dari itu hasilnya diharapkan dapat mengungkapkan nilai-nilai tersembunyi dari kebijakan tersebut. Selain itu penelitian ini akan lebih peka terhadap informasi yang bersifat kualitatif deskriptif dengan cara relatif berusaha mempertahankan keutuhan dari obyek yang diteliti. Dengan demikian, melalui penelitian ini dapat dijelaskan secara terperinci jalan cerita secara kronologis, sehingga hasil akhirnya bisa memberikan rekomendasi kepada *policy maker* untuk merumuskan kembali sekaligus sebagai penyempurnaan suatu kebijakan yang akan diambil dan diimplementasikan.

Selanjutnya, seperti dijelaskan di awal bahwa pada hakikatnya kajian dan evaluasi ini berbasis penelitian kualitatif dengan prosedur serta tahap-tahap yang sesuai dengan ‘kultur’ pendekatan naturalistik. Akan tetapi, dalam penerapannya acapkali tahapan-tahapan tersebut secara ideal sulit dilakukan karena terkendala oleh sejumlah faktor, antara lain seperti waktu dan cakupan masalah yang diteliti. Untuk menyalahi kondisi tersebut, maka peneliti memilih untuk berkompromi dengan pendekatan kuantitatif khususnya dalam hal pengumpulan dan analisis data. Dengan tetap bertumpu pada *focus group discussion (FGD)* serta *indepth interview* kepada para informan sebagaimana direkomendasikan dalam aras kualitatif, peneliti juga menggunakan instrumen kuesioner yang populer dalam ranah pendekatan kuantitatif dan statistik untuk menjangkau sejumlah data kepada responden. Oleh Chaedar (2002) dalam bukunya “*Pokoknya*

Kualitatif” dinyatakan bahwa penggunaan instrumen statistik dalam penelitian yang berkarakter kualitatif bisa ditoleransi dalam upaya untuk melakukan triangulasi data serta memperoleh kehandalan data yang juga berfungsi sebagai ‘penyeimbang’ sekaligus pembanding dengan data-data yang diperoleh secara kualitatif, sehingga data yang diperoleh berada atau mendekati puncak kejenuhan (*saturate*) (Moleong, 1986). Penggunaan instrumen statistik dalam riset kualitatif populer disebut dengan *quasi statistic* (Chaedar, 2002).

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Untuk melihat implementasi program bantuan sosial Masyarakat Berpendapatan Rendah di SDN Tanah Kalikedinding II/252 Kota Surabaya, peneliti menggunakan teori George Edward III. Dalam teori George Edward III disebutkan bahwa ada empat aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Aspek pertama, yaitu komunikasi. Komunikasi dalam implementasi program bantuan sosial Masyarakat Berpendapatan Rendah berkaitan dengan penyampaian informasi. George Edward III menyebutkan bahwa agar pelaksana dapat mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan program, diperlukan proses penyampaian informasi mengenai program bantuan sosial Masyarakat Berpendapatan Rendah dari *policy makers* (pemerintah) kepada pelaksana kebijakan *policy implementors* (pengelola MBR tingkat sekolah) (Joko Widodo, 2008). Proses penyampaian informasi tersebut hanya dapat dilakukan melalui komunikasi/ sosialisasi.

1. Komunikasi

Program Bantuan sosial bagi masyarakat Kota Surabaya yang berpendapatan rendah diperuntukkan pada keperluan pendidikan, merupakan salah satu bentuk kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam mensubsidi biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa Sekolah Dasar Negeri Tanah Kalikedinding II/252 Kota Surabaya dari keluarga yang kurang mampu. Bantuan sosial masyarakat dimaksudkan untuk mengamankan upaya jangka panjang guna memutus rantai kemiskinan dengan memastikan masyarakat miskin bisa mengakses pendidikan, sehingga mutu sumber daya manusia di Kota Surabaya

terus meningkat dan mampu bersaing dalam era masyarakat global.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa proses penyampaian informasi mengenai implementasi kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2022 di Sekolah Dasar Negeri Tanah Kalikedinding II/ 252 Kota Surabaya di mulai dari para pembuat kebijakan (*policy makers*) yaitu Pemerintah kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) yaitu pemerintah daerah yang terdiri dari pejabat daerah terkait dan staf Dinas Sosial yang kemudian diteruskan kepada kecamatan dan kelurahan serta pengelola/ pelaksana program bantuan sosial di tingkat sekolah. Jika pengelola/ pelaksana program bantuan sosial mendapatkan informasi yang cukup, maka akan mempermudah mereka untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam melakukan prosedur pelaksanaan bantuan sosial. Berbeda dengan pengelola/ pelaksana program bantuan sosial, para kelompok sasaran bantuan sosial yaitu siswa dan orangtua siswa di Sekolah Dasar Negeri Tanah Kalikedinding II/ 252 Kota Surabaya merasa informasi mengenai bantuan sosial belum tersosialisasikan secara mendalam.

2. Sumber Daya

Dalam melakukan pendataan siswa bantuan sosial yang di serahkan datanya oleh Dinas Sosial Kota Surabaya serta kelurahan setempat, memang sangat dibutuhkan pelaksana/ pengelola program yang memiliki keahlian dalam menggunakan Ms. Excel ataupun Ms. Word. Program-program tersebut dapat mempermudah seseorang dalam membuat laporan dan menghitung data yang sangat banyak dengan menggunakan rumus yang sudah tersedia. Dengan keahlian yang dimiliki ARK ataupun pegawai TU lainnya dalam menggunakan Ms. Excel dan Ms. Word tersebut, akan mempermudah dan mempercepat kinerja mereka dalam melakukan pendataan siswa sehingga pelaksanaan kebijakan/ program bantuan sosial MBR tersebut bisa terlaksana dengan baik, untuk pendataan awal dari kelurahan setempat dan dibantu RT/ RW, ujung tombaknya memasukan data awal yaitu pihak RT, kelurahan hanya meneruskan ke Dinas Sosial, dan SDM Dinas Sosial tidak akan mencoret

begitu saja tanpa ada pertimbangan dari kelurahan dan RT tersebut, data dimasukan sudah berbentuk final, hanya melengkapi berkas yang kurang dan upload data dibantu oleh petugas kelurahan setempat.

3. Disposisi

Respon yang positif terhadap program bantuan sosial tidak hanya berasal dari pelaksana saja, tetapi juga dari orang tua siswa yang merupakan target grup dari kebijakan tersebut. Beberapa siswa yang peneliti wawancarai memberikan respon positif terhadap program bantuan sosial tersebut.

Dari pendapat orangtua di atas dapat dijelaskan bahwa, orangtua sangat mendukung program bantuan sosial yang dikhususkan untuk membantu siswa kurang mampu agar tidak putus sekolah karena alasan kesulitan biaya. Para orangtua siswa merasa senang dan bersyukur karena bantuan sosial dapat menunjang keperluan sekolah anak-anak mereka.

4. Struktur Birokrasi

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa antara pengelola bantuan sosial di Sekolah Dasar Negeri Tanah Kalikedinding II/ 252 Kota Surabaya sudah terdapat fragmentasi/ penyebaran tanggung jawab dalam melaksanakan program bantuan sosial bagi warga yang berpendapatan rendah serta terjalin kerjasama yang baik antar pengelola bantuan sosial tersebut. Pihak pengelola bantuan sosial di Sekolah Dasar Negeri Tanah Kalikedinding II/ 252 Kota Surabaya juga menjalin kerjasama dengan pihak Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam mensosialikan program bantuan Sosial kepada siswa ataupun orangtua siswa yang berpendapatan rendah di sekolah tersebut. Selain dengan Dinas Sosial, pengelola bantuan sosial di Sekolah Dasar Negeri Tanah Kalikedinding II/ 252 Kota Surabaya juga menjalin koordinasi dengan orangtua siswa dan pihak kelurahan di wilayah masing-masing dalam hal konsultasi mengenai pelaksanaan bantuan sosial oleh Walikota Surabaya.

Faktor Penghambat:

- 1) Pendataan awal dimulai dari RT dan kelurahan, bukan awal memintak data kepada sekolah untuk siapa saja yang berhak menerima.

Karena sekolah yang memahami keadaan siswa apabila dilihat dari kesehariannya di sekolah.

- 2) Unsur nepotisme muncul dikarenakan pendataan awal dari RT maka paling banyak yang mendapatkan bantuan masih kerabatnya RT atau pegawai kelurahan atau yang memiliki hubungan baik.
- 3) Pihak sekolah hanya pada saat pelaksanaan program bantuan saja bertugas mengkoordinir apa saja kebutuhan siswa yang akan dibeli saat mendapatkan program bantuan tersebut, bukan pendataan awal sampai pelaksanaan bantuan.
- 4) Pengawasannya kurang maksimal dalam pelaksanaan program sehingga bantuan yang berupa barang perlengkapan sekolah bisa disalahgunakan oleh orang tua siswa.

Faktor pendukung

- 1) Pihak sekolah diberi tanggung jawab untuk mengontrol dan mengelola saat siswa mendapat bantuan agar tidak disalahgunakan di kemudian hari.
- 2) Walimurid dan siswa kompak dan terbuka dalam menjalan implementasi program bantuan sosial bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kota Surabaya.
- 3) Pihak sekolah SDN Tanah Kalikedinding II/ 252 sangat terbuka dalam implementasi program bantuan tersebut.
- 4) Sumberdaya manusia di SDN Tanah Kalikedinding II/ 252 Surabaya juga mumpuni dalam mengelola dan mendampingi masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut.

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Jika dilihat dari keempat aspek di atas, pelaksanaan program MBR di SDN Tanah Kalikedinding II/ 252 dapat dikatakan masih kurang pada aspek komunikasi/ sosialisasi. Informasi yang disosialisasikan dari sekolah kepada siswa dan orang tua siswa masih belum jelas sehingga menimbulkan kebingungan serta iri antar walimurid karena ada yang selayaknya dapat tetapi faktanya tidak dapat bantuan, itu muaranya pada pendataan awal oleh RT dan kelurahan, ada unsur kekeluargaan untuk pendataan awal program, akan tetapi seluruh sumber daya juga sudah terpenuhi dan disposisi pelaksana dalam implementasi program MBR juga cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan

kinerja yang efektif sehingga dapat memberikan pelayanan kepada siswa. Selain itu adanya juknis pelaksanaan dan pembagian tugas antarinstansi serta kerjasama yang baik dari organisasi pelaksana program juga menambah keberhasilan pelaksanaan program MBR.

Faktor kendala dan pendukung, pendataan awal dimulai dari RT dan kelurahan, bukan awal meminta data kepada sekolah untuk siapa saja yang berhak menerima. karena sekolah yang memahami keadaan siswa yang bisa diamati dari kesehariannya, Unsur nepotisme muncul dikarenakan pendataan awal dari RT maka, paling banyak yang mendapatkan bantuan masih kerabatnya RT atau pegawai kelurahan, Pihak sekolah hanya pada saat pelaksanaan program bantuan saja, hanya bertugas mengkoordinir apa saja kebutuhan siswa yang akan dibeli saat mendapatkan program bantuan tersebut, tidak hanya pendataan awal sampai pelaksanaan bantuan, serta pengawasannya kurang maksimal dalam pelaksanaan program. Pihak sekolah diberi tanggung jawab untuk mengontrol dan mengelola siswa yang mendapat bantuan agar tidak disalahgunakan di kemudian hari, walimurid dan siswa kompak dan terbuka dalam menjalan implementasi program bantuan sosial bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kota Surabaya. Pihak sekolah SDN Tanah Kalikedinding II/ 252 sangat terbuka dalam implementasi program bantuan tersebut, sumberdaya manusia di SDN Tanah Kalikedinding II/252 Surabaya juga mumpuni dalam mengelola dan mendampingi masyarakat yang mendapatkan bantuan tersebut.

2. Rekomendasi

- a) Program bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah khusus untuk anak sekolah seharusnya pendataan awal diserahkan Dinas Pendidikan dan berkoordinasi dengan kelurahan masing-masing agar program tepat sasaran.
- b) Dinas Sosial memperluas jaringan sosialisasi mengenai MBR kepada masyarakat luas sehingga masyarakat miskin yang tidak terjangkau yang tidak memiliki akses informasi bisa mengetahui adanya program MBR.
- c) Sekolah diharapkan meningkatkan intensitas sosialisasi kepada siswa ataupun

orangtua siswa mengenai pelaksanaan program MBR terutama dalam hal kelengkapan yang harus dipenuhi siswa ketika mendaftar MBR agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara orangtua siswa dan pihak sekolah.

- d) Sebaiknya pertanggungjawaban dari seluruh kegiatan penggunaan program Masyarakat Berpenghasilan Rendah dilaporkan secara *akuntability* dengan transparan kepada penanggung jawab program, bantuan diperuntukkan untuk apa, dan aspek keberhasilannya sampai mana.

REFERENSI

- Agung, Jakarta Sasongko, Haryo, 2001, *Pengelolaan Pengembangan Kota di Era Otonomi Daerah*, Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ekowati, Lilik. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi atau Program*. Surakarta: Pustaka Cakra
- Islamy, Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Muhammad, Abdulkadir. 2007. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Citra Aditya
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Peraturan walikota surabaya nomor 56 tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas peraturan walikota Surabaya nomor 58 tahun 2019 tentang tata cara pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan dan pelaporan data masyarakat berpenghasilan rendah
- Siagian, Sondang. 1983. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: CV Haji Masagung
- Soekanto, Soejono. 1997. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Surachmad, Winarno. 1978. *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Thoha, Miftah. 2002. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sedarmayanti, 2014, *Manajemen Sumber Daya Manusia : Reformasi Birokrasi*
- Wahab, Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formula Keimplementasian Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibawa, Samudra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Grafindo Persada.